



Karakteristik Pengembangan Wilayah Sebelum dan Sesudah Pemekaran Kabupaten Jayapura

Agustinus Kaeng Udiarto¹

Magister Pembangunan Wilayah dan Kota

Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

Artikel Masuk : 11 Juni 2015

Artikel Diterima : 7 Agustus 2015

Publikasi Online : 31 Agustus 2015

Abstrak: Isu pengembangan wilayah di Jayapura tidak dapat dipisahkan dari isu pemekaran wilayah. Pemekaran wilayah di Kabupaten Jayapura pada hakekatnya dilakukan untuk menciptakan pemerintah yang efektif dan efisien serta diharapkan mampu menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi tingkat kemiskinan, meningkatkan pelayanan baik kesehatan maupun pendidikan yang diikuti dengan bertambahnya sarana infrastruktur yang memadai. Di samping itu, pemekaran wilayah di Kabupaten Jayapura bertujuan untuk pemeratakan persebaran penduduk dan mempercepat proses pengembangan wilayah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengembangan wilayah di Kabupaten Jayapura sebelum dan setelah pemekaran, dengan rentang waktu 2002 dan 2012. Analisis pengaruh pemekaran terhadap pengembangan wilayah dibatasi pada aspek ekonomi, sosial kependudukan dan infrastruktur. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif untuk membandingkan kondisi variabel-variabel terpilih sebelum dan sesudah pemekaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara makro pengaruh pemekaran di Kabupaten Jayapura memiliki kecenderungan positif, baik dari aspek ekonomi maupun sosial kependudukan. Secara mikro, pengaruh pemekaran di Kabupaten Jayapura pada aspek ekonomi di variabel angka pengangguran menunjukkan kecenderungan perkembangan yang negatif. Pada aspek sosial kependudukan hanya pada variabel rasio guru terhadap murid yang menunjukkan kecenderungan negative, sedangkan pada aspek infrastruktur menunjukkan kecenderungan perkembangan yang positif.

Kata Kunci: Pemekaran Wilayah, Pengembangan Wilayah, Aspek Ekonomi, Aspek Sosial Kependudukan, Aspek Infrastruktur

Abstract: *The issue of regional development in Jayapura cannot be separated from the issue of regional division. Expanding a region in Jayapura is essential to create an efficient and effective government, to generate work opportunity, to reduce poverty, and to improve health services as well as education services, followed by increasing the number of infrastructures. Furthermore, expanding the region in Jayapura district aims to equalize the distribution of population and accelerate the development process of the region. This study aims to compare the development of the region in Jayapura before and after the split, to focus on economic, social demography and infrastructure within the time frame of 2002 and 2012. This study uses quantitative method for data processing, with a comparative analysis as an approach to compare variables of economic, social demography and infrastructure. The results showed*

¹ Korespondensi Penulis: Program Studi Magister Pembangunan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro
Email: agustinuskaeng87@gmail.com

that the influence of macro expansion in Jayapura district has a positive trend, both from the economic and social aspects of demography. On the micro level, the effect of the expansion in Jayapura on economic aspects in unemployment variable rate showed a trend of negative developments. On the demography aspect, only ratio of teachers to students' variable that has a negative trend. While, on the infrastructure aspects, showed a trend of positive development. Overall, all the districts in Jayapura has been developing after the expanding of the region.

Keywords: *Regional Development, Expanding a Region, Aspect of Economic, Aspect of Social Demography, Aspect of Infrastructure*

Pendahuluan

Fenomena pemekaran wilayah di Papua pasca pemerintahan orde baru hingga memasuki pemerintahan saat ini menarik untuk ditelaah secara mendalam. Isu pemekaran wilayah terutama di Papua selalu disertai dengan isu-isu seputar reformasi, demokratisasi, HAM (Hak Asasi Manusia) dan keadilan sosial. Papua memiliki banyak potensi sumber daya alam yang melimpah namun belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Khairullah & Cahyadin (2006) menyatakan bahwa pemekaran wilayah kabupaten baru pada dasarnya dilakukan sebagai upaya meningkatkan kualitas dan intensitas pelayanan pada masyarakat.

Provinsi Papua memiliki potensi yang sangat besar dalam bidang ekonomi dan memiliki sumberdaya alam yang melimpah. Namun, kondisi geografis yang tidak mendukung menjadi salah satu kendala daerah ini untuk dikembangkan dengan cepat. Limitasi kondisi geografis menyebabkan terjadinya ketimpangan pembangunan wilayah yang cukup besar karena terjadi aglomerasi/pemusatan kegiatan ekonomi di Kota Jayapura sebelum terjadinya pemekaran wilayah. Aglomerasi adalah suatu proses perkembangan daerah yang umum terjadi namun perlu dikendalikan agar tidak menciptakan ketimpangan pembangunan (Isard dalam Sakti, 2010).

Sejalan dengan adanya pemekaran wilayah di Indonesia, Kabupaten Jayapura merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Papua yang mampu melaksanakan pembangunan dengan baik. Sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Jayapura, baik sebelum maupun sesudah adanya pemekaran wilayah, sektor pertanian merupakan sektor utama dan berperan penting bagi pembangunan. Harapan dengan adanya pemekaran wilayah ini adalah terjadi pertumbuhan ekonomi, yang indikasinya dapat dilihat dari peningkatan sektor sekunder serta tersier yang diikuti dengan menurunnya peranan sektor primer dalam PDRB, pemerataan pendapatan dan mengurangi ketimpangan pembangunan di Kabupaten Jayapura.

Dikutip dari BPS Propinsi Papua bahwa pada tahun 2010, dengan luas wilayah Papua 317.062 km² atau setara dengan 17,04% dari luas Indonesia (1.860.359,67 km²), dengan jumlah penduduk yang paling sedikit di Indonesia sebesar 1,19% (2.097.482 jiwa), maka kepadatan penduduk yang ada di wilayah Papua hanya sekitar 9 jiwa/km². Dengan fakta ini munculah permasalahan pembangunan di Papua antara lain pertama, terjadinya ketimpangan pembangunan yang disebabkan karena persebaran penduduk yang tidak merata disebabkan daerah yang sangat luas. Kedua, terjadinya kemiskinan yang disebabkan oleh tidak adanya pemerataan pembangunan di setiap daerah Papua sedangkan pusat-pusat kegiatan pembangunan atau perekonomian hanya di daerah tertentu.

Berdasarkan pada fenomena mengenai pemekaran wilayah yang terjadi pada Kabupaten Jayapura tersebut, maka pertanyaan penelitian yang dirumuskan yaitu "Bagaimana Pengaruh pemekaran wilayah terhadap pengembangan wilayah di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua?"

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kuantitatif. Metode ini digunakan untuk mengkaji pengaruh pemekaran wilayah di era otonomi daerah terhadap pengembangan wilayah di Kabupaten Jayapura. Pengaruh pemekaran wilayah di era otonomi daerah terhadap pengembangan wilayah dalam penelitian ini dilihat segi ekonomi, sosial penduduk dan infrastuktur. Penelitian ini dilakukan melalui pengumpulan data sekunder dan evaluasi sumatif. Menurut Kerlinger (1996), penelitian sekunder adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil dengan pengumpulan data sekunder melalui dokumen-dokumen dan laporan dari data penelitian. Kemudian peneliti membandingkan suatu kejadian, kegiatan, produk dengan standar dan program yang telah ditetapkan kemudian melakukan evaluasi yang berfungsi untuk menjelaskan fenomena yang terjadi. Hal ini disebut juga penelitian sumatif. Dengan demikian hasil penelitian evaluasi sumatif menekankan pada efektifitas pencapaian program yang berupa produk tertentu (Kidder dalam Riduwan, 2004: 54).

Gambaran Umum

Kabupaten Jayapura adalah kawasan yang terletak diantara 139°15' BB – 140°45' BT dan 2°15' LU – 3°45' LS. Luas wilayah administrasi Kabupaten Jayapura adalah 17.516,6 km². Secara administrasi Kabupaten Jayapura memiliki batas-batas wilayah antara lain:

- Sebelah Utara : Kabupaten Sarmi dan Samudra Pasifik;
- Sebelah Selatan : Kabupaten Pegunungan Bintang dan Tolikara;
- Sebelah Barat : Kabupaten Sarmi;
- Sebelah Timur : Kabupaten Keerom dan Kota Jayapura.

Tabel 1 menyajikan nama distrik dan luas wilayah masing-masing distrik di Kabupaten Jayapura sebelum dan setelah pemekaran. Distrik Kaureh merupakan distrik terluas di Kabupaten Jayapura dengan luas 4.537,9 km² atau sekitar 24,88% dari luas keseluruhan Kabupaten Jayapura. Sedangkan kabupaten terkecil adalah Sentani Barat dengan luas sekitar 129,2 km² atau sekitar 0,47% dari luas Kabupaten Jayapura.

Tabel 1. Distrik Di Kabupaten Jayapura Sebelum dan Setelah Pemekaran

Nama Distrik Tahun 2002	Nama Distrik Tahun 2012	Luas (Km ²)	Luas (Km ²)	Keterangan
Sentani Timur	Sentani Timur	484,22		
Sentani	Sentani	225,97	871,58	Merupakan Distrik Pemekaran dari Distrik Sentani Berdasarkan Perda Kab. Jayapura No.12 Tahun 2003
	Ebungfau	387,36		
	Waibu	258,25		
Sentani Barat	Sentani Barat	129,13		
Demta	Demta	479,43	998,87	Merupakan Distrik Pemekaran dari Distrik Demta Berdasarkan Perda Kab. Jayapura No.2 Tahun 2006
	Yokari	519,44		
Depapre	Depapre	404,28	871,58	Merupakan Distrik Pemekaran dari Distrik Depapre Berdasarkan Perda Kab. Jayapura No.2 Tahun 2006
	Ravenirara	467,3		

Nama Distrik Tahun 2002	Nama Distrik Tahun 2012	Luas (Km ²)	Luas (Km ²)	Keterangan
Kemtuk	Kemtuk	258,25		
Kemtuk Gresi	Kemtuk Gresi	382,35	526,21	Merupakan Distrik Pemekaran dari Distrik Kemtuk Gresi Berdasarkan Perda Kab. Jayapura No.2 Tahun 2006
	Gresi Selatan	143,86		
Nimboran	Nimboran	710,19	903,88	Merupakan Distrik Pemekaran dari Distrik Nimboran Berdasarkan Perda Kab. Jayapura No.12 Tahun 2003
	Namblong	193,69		
Nimbokrang	Nimbokrang	774,75		
Unurum Guay	Unurum Guay	3131,29		
Kaureh	Kaureh	4357,98	8564,2	Merupakan Distrik Pemekaran dari Distrik Kaureh Berdasarkan Perda Kab. Jayapura No.12 Tahun 2003
	Yapsi	1291,25		
	Airu	2915,01		

Sumber: Perda Kabupaten Jayapura, 2006

Kajian Teori

Definisi pemekaran wilayah dari Kamus Besar Bahasa Indonesia masih menjadi perdebatan, karena dirasakan tidak relevan dengan makna pemekaran wilayah yang kenyataannya malah terjadi penyempitan wilayah atau menjadikan wilayah menjadi kecil dari sebelumnya karena seringkali pemekaran daerah itu bukan penggabungan dua atau lebih daerah otonom yang membentuk daerah otonom baru, akan tetapi pemecahan daerah otonom menjadi dua atau lebih daerah otonom baru.

Pada prinsipnya, pemekaran wilayah dilakukan untuk mengoptimalkan jangkauan pelayanan kepada masyarakat (Rasyid, 2007). Lebih jauh, pemekaran wilayah kabupaten/kota menjadi beberapa kabupaten/kota baru pada dasarnya merupakan upaya meningkatkan kualitas dan intensitas pelayanan pada masyarakat (Khairullah & Cahyadin, 2006). Pemekaran wilayah tidak lain bertujuan untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan, membuka ketimpangan-ketimpangan pembangunan wilayah dan menciptakan perekonomian wilayah yang kuat demi tercapainya kesejahteraan masyarakat, sehingga pemekaran wilayah diharapkan dapat mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, membuka peluang baru bagi upaya pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan intensitas pembangunan guna mensejahterakan masyarakat.

Perkembangan suatu wilayah itu sangat bergantung pada aspek ekonomi, sosial, dan infrastruktur yang tersedia pada suatu daerah. Dari ketiga aspek tersebut diharapkan bahwa kebijakan apapun yang diambil dalam pengembangan suatu wilayah, khususnya dalam kebijakan pemekaran wilayah di era otonomi daerah, sangat perlu diperhatikan. Hal ini dapat dilihat dari potensi lokal yang ada di wilayah tersebut karena akan meningkatkan ekonomi daerah tersebut. Selain itu, populasi yang terus meningkat di suatu daerah perlu diimbangi dengan ketersediaan infrastruktur sehingga kesejahteraan dapat tercapai dan masyarakat mendapatkan pelayanan publik yang efektif dan efisien sebagai dasar tujuan dari pemekaran wilayah itu sendiri.

Faktor-faktor lain yang memicu terjadinya pemekaran wilayah antara lain perbedaan agama, perbedaan etnis dan budaya, ketimpangan pembangunan ekonomi antar daerah, serta luas daerah. Hal ini didukung dengan pernyataan Syafrizal dalam Ventauli (2009)

menyatakan bahwa yang terjadi dalam masyarakat menunjukkan bahwa perbedaan agama merupakan salah satu unsur yang dapat menyebabkan timbulnya keinginan masyarakat untuk memisahkan diri dari suatu negara/daerah yang telah ada untuk menjadi negara/daerah baru, perbedaan etnis dan budaya juga merupakan unsur penting lainnya yang dapat memicu terjadinya keinginan untuk melakukan pemekaran wilayah. Kenyataan menunjukkan bahwa bila kesatuan budaya ini terganggu karena kehadiran warga masyarakat lain dengan budaya yang berbeda, maka seringkali terjadi ketegangan bahkan konflik sosial dalam masyarakat tersebut. Ketimpangan pembangunan ekonomi antar daerah ini selanjutnya mendorong terjadinya kecemburuan sosial dan merasa dianaktirikan oleh pemerintah pusat sehingga akhirnya muncul keinginan untuk melakukan pemekaran wilayah, selain itu wilayah yang besar akan cenderung menyebabkan pelayanan publik tidak dapat dilakukan secara efektif dan merata ke seluruh pelosok daerah.

Menurut World Bank (2001) ada empat faktor pendorong adanya pemekaran wilayah di era pasca reformasi, yaitu: 1) Motif untuk efektivitas/efisiensi administrasi pemerintahan mengingat wilayah daerah yang begitu luas, penduduk yang menyebar dan keteringgalan pembangunan; 2) kecenderungan untuk homogenitas (etnis, bahasa, agama, urban-rural, tingkat pendapatan, dan lain-lain); 3) adanya kemajuan fiskal yang dijamin oleh undang-undang (disediakan Dana Alokasi Umum/DAU, bagi hasil dari sumber daya alam dan disediakannya sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah/PAD); 4) motif pemburu rente (*bureaucratic a political rent-seeking*) para elit.

Analisis

Pengaruh pemekaran wilayah di Kabupaten Jayapura dapat kita lihat dari segi makro maupun mikro. Secara makro pemekaran wilayah di Kabupaten Jayapura, apabila dibandingkan dengan Provinsi Papua sebagai *benchmark* atau tolak ukurnya, telah mengalami peningkatan atau perkembangan terutama dalam aspek ekonomi maupun sosial kependudukan. Hal ini dapat dilihat dari kondisi makro Kabupaten Jayapura yang memiliki kecenderungan positif. Jika dibandingkan dengan Provinsi Papua, Kabupaten Jayapura memiliki kondisi yang lebih baik karena pemekaran yang terjadi dapat dikatakan berhasil atau mampu memberikan pengaruh yang positif terhadap perkembangan wilayah Kabupaten Jayapura.

Namun perlu diperhatikan secara khusus, walaupun hampir semua nilai variabel Kabupaten Jayapura berada diatas Provinsi Papua, pada variabel angka harapan hidup mengalami peningkatan, tapi masih berada dibawah Provinsi Papua hal ini harus diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Jayapura. Dapat indikasikan secara makro bahwa apabila aspek sosial penduduk mengalami peningkatan hal tersebut akan berbanding lurus dengan aspek ekonomi yang juga cenderung mengalami peningkatan. Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Riyadi (2002) bahwa pengembangan wilayah merupakan upaya untuk memacu perkembangan sosial-ekonomi dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

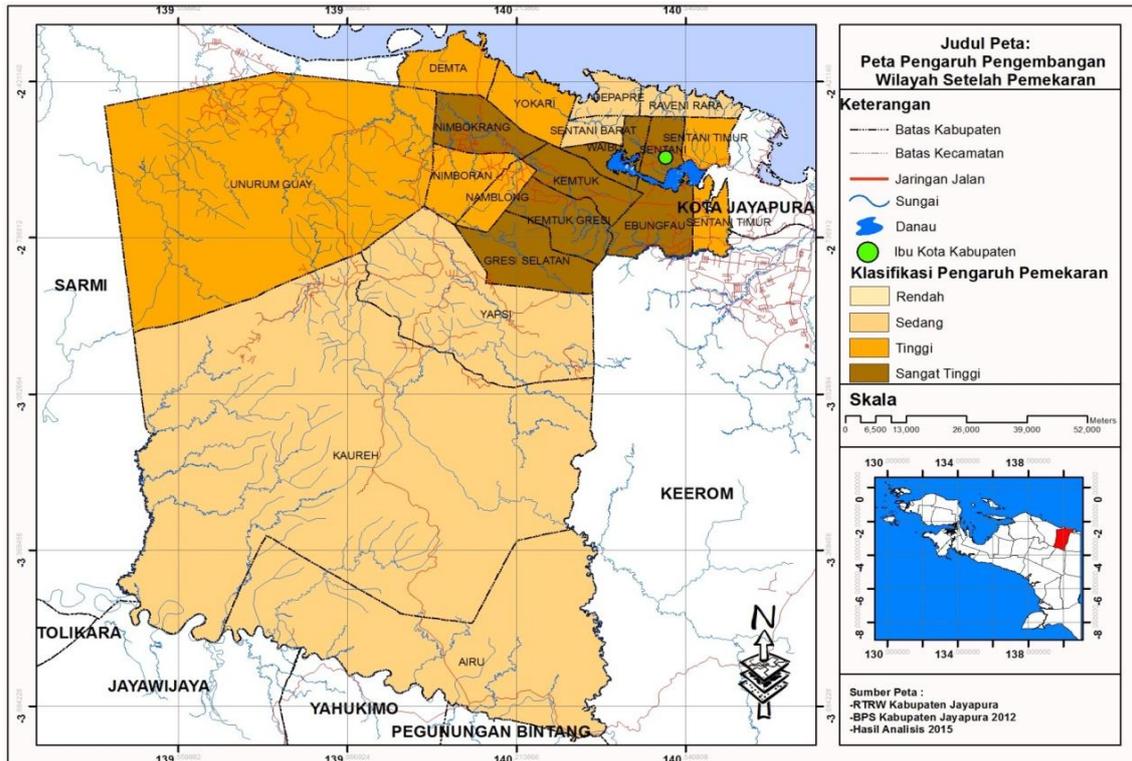
Apabila diidentifikasi secara mikro, aspek ekonomi, aspek sosial kependudukan dan aspek infrastruktur mengalami kecenderungan perkembangan yang positif. Pertama, pada aspek ekonomi, hanya pada variabel angka pengangguran saja yang kecenderungannya negatif. Artinya dengan adanya pemekaran wilayah tersebut banyak penduduk dari luar Kabupaten Jayapura yang datang tetapi lapangan pekerjaannya belum mencukupi. Senada dengan yang dikatakan Jhingan (1992: 26-27) bahwa potensi pertumbuhan penduduk yang tinggi umumnya terjadi di negara berkembang dan akan meningkatkan jumlah tenaga kerjanya, pengangguran membengkak seiring dengan urbanisasi dan strata pendidikan di masyarakat yang tidak diiringi oleh penambahan sektor industri. Selain itu pada variabel jumlah penduduk non pertanian mengalami kecenderungan positif. Dapat disimpulkan

bahwa pengembangan wilayah senantiasa disertai oleh adanya perubahan struktural. Wilayah tumbuh dan berkembang dapat didekati melalui teori sektor (*sector theory*). Teori sektor diadopsi dari Fisher (1981) yang mengemukakan bahwa berkembangnya wilayah, atau perekonomian nasional dihubungkan dengan transformasi struktur ekonomi dalam tiga sektor utama, yakni sektor primer (pertanian, kehutanan, dan perikanan), serta sektor tersier (perdagangan, transportasi, keuangan, dan jasa). Perkembangan ini ditandai oleh penggunaan sumber daya dan manfaatnya, yang menurun di sektor primer, meningkat di sektor tersier, dan meningkat hingga pada suatu tingkat tertentu di sektor sekunder.

Kedua, bila dilihat pada aspek pelayanan publik hanya pada variabel rasio guru terhadap murid yang kecenderungannya negatif artinya pada tahun 2002 terdapat 1 orang guru mengajar 14 siswa, sedangkan pada tahun 2012 terdapat 1 orang guru mengajar 18 siswa. Dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan bentuk investasi yang sangat penting bagi pengembangan suatu wilayah. Senada dengan Galbraith (dalam Jhingan, 1992: 550) pendidikan menjadi suatu bentuk investasi yang sangat produktif. Selain itu pada angka bayi lahir mati kecenderungannya positif hal ini menunjukkan semakin meningkatnya kualitas kesehatan, hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Jhingan (1992: 551) untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas, kesehatan masyarakat harus diperbaiki. Langkah tersebut meliputi perbaikan sanitasi lingkungan, perbaikan pembuangan air kotor dan menggenang, pembenahan daerah kumuh, penyediaan perumahan yang lebih baik, penyediaan air bersih, penyediaan fasilitas pembuangan kotoran yang lebih baik, pengawasan penyakit menular, penyediaan layanan medis dan kesehatan, terutama kesejahteraan ibu dan anak, pendidikan, kesehatan dan keluarga berencana, serta latihan petugas medis kesehatan.

Ketiga, bila dilihat pada aspek infrastruktur kecenderungannya positif. Artinya sarana yang tersedia setelah ada pemekaran itu semakin banyak jumlahnya dalam hal ini sarana pendidikan dan kesehatan. Dapat disimpulkan bahwa pemekaran memberikan pengaruh terhadap ketersediaan infrastruktur. Definisi teknik juga memberikan spesifikasi yang dilakukan sistem infrastruktur dan mengatakan infrastruktur adalah aset fisik yang dirancang dalam sistem, sehingga memberikan pelayanan publik yang penting. Infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi (Grigg dalam Kodoatie, 2005).

Keempat, pengaruh pemekaran terhadap pengembangan wilayah di Kabupaten Jayapura terbagi dalam tiga kategori, yaitu pengaruh sangat tinggi, tinggi, dan sedang. Gambar 1 menyajikan mengenai peta pengaruh pengembangan wilayah Kabupaten Jayapura setelah pemekaran. Dari peta tersebut terlihat kualifikasi tingkat pengaruh pada daerah-daerah di Kabupaten Jayapura setelah pemekaran terjadi.



Gambar 1. Peta Pengaruh Pengembangan Wilayah Kabupaten Jayapura Setelah Pemekaran

Adapun pengaruh pemekaran terhadap pengembangan wilayah di Kabupaten Jayapura secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kondisi pengembangan wilayah dengan pengaruh sedang terjadi di Kecamatan Kaureh, Kecamatan Depapre, dan Kecamatan Sentani Barat. Pada Kecamatan Kaureh terjadi karena kondisi geografis berupa daerah pegunungan dan terletak jauh dengan Ibukota Kabupaten Jayapura dapat diartikan belum mampu mengoptimalkan jangkauan pelayanan antar kecamatan. Padahal pemekaran wilayah harus mampu mengoptimalkan jangkauan pelayanan ke masyarakatnya sebagaimana dikatakan Rasyid (2007). Sedangkan pada Kecamatan Depapre dan Kecamatan Sentani Barat jangkauan pelayanan sudah optimal namun belum memiliki ketersediaan infrastruktur. Padahal keberhasilan pengembangan wilayah dapat diukur dari ketersediaan, kecukupan serta kemampuan sarana dan prasarana yang mempunyai peranan penting terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh Grigg (dalam Kodoatie, 2005) bahwa infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi.
2. Kondisi pengembangan wilayah dengan pengaruh tinggi terjadi di Kecamatan Nimboran, Unurum Guay, Demta, dan Sentani Timur. Dapat disimpulkan terjadi pengaruh yang tinggi karena di Kecamatan Nimboran dan Demta belum memiliki layanan infrastruktur yang optimal, seperti sarana kesehatan dan pendidikan. Padahal motif dari pemekaran wilayah menurut World Bank (2001) mencakup efektifitas/efisiensi pelayanan kepada masyarakat. Meskipun penduduk miskin dan angka penganggurannya berkurang. Di Kecamatan Unurum Guay terjadi sebaliknya, dimana terjadi peningkatan ketersediaan infrastruktur (sarana kesehatan dan pendidikan), namun penduduk miskin dan angka penganggurannya meningkat.

Sehingga keberhasilan pengembangan wilayah memiliki keterkaitan yang linear dengan aspek ekonomi, sosial kependudukan dan infrastruktur. Sejalan dengan Khairullah & Cahyadin (2006) yang mengungkapkan bahwa pemekaran wilayah kabupaten baru pada dasarnya sebagai upaya meningkatkan kualitas dan intensitas pelayanan pada masyarakat;

3. Kecamatan dengan kecenderungan perkembangan sangat tinggi terjadi hubungan yang linier antara aspek ekonomi, sosial kependudukan dan infrastruktur, pengembangan wilayah menurut Schumpeter (dalam Jhingan, 1992: 6) adalah perubahan spontan dan terputus-putus dalam keadaan stasioner yang senantiasa mengubah dan mengganti situasi keseimbangan yang ada sebelumnya, dimana dapat diasumsikan bahwa indikator pengembangan wilayah dapat ditinjau dari perkembangan aspek ekonomi, sosial dan infrastruktur terkecuali Kecamatan Sentani. Terlepas dari kondisi penduduk miskin dan angka pengangguran yang tinggi di Kecamatan Sentani, persentase penduduk non pertanian mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Senada dengan yang dikatakan dengan Kutnets dalam Jhingan (1983: 72-82) laju pertumbuhan struktural yang tinggi ditandai dengan pengalihan kegiatan pertanian ke non pertanian.

Kesimpulan

Secara makro, perkembangan Kabupaten Jayapura yang dilihat dari aspek ekonomi, sosial penduduk, dan infrastruktur memiliki kecenderungan yang positif, dimana jika dibandingkan dengan Provinsi Papua, kondisi Kabupaten Jayapura memiliki kondisi yang lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa pemekaran yang dilakukan bisa dikatakan berhasil atau memberikan pengaruh yang positif terhadap perkembangan wilayah Kabupaten Jayapura. Namun perlu diperhatikan secara khusus, walaupun hampir semua nilai variabel Kabupaten Jayapura berada diatas Provinsi Papua, pada variabel angka harapan hidup mengalami peningkatan namun masih berada dibawah Provinsi Papua sehingga hal ini harus diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Jayapura.

Aspek ekonomi secara mikro hanya pada variabel angka pengangguran saja yang kecenderungannya negatif. Artinya dengan adanya pemekaran wilayah tersebut banyak penduduk dari luar Kabupaten Jayapura yang datang tetapi lapangan pekerjaanya belum mencukupi. Selain itu pada variabel jumlah penduduk non pertanian mengalami kecenderungan positif, dimana terdapat pergeseran mata pencaharian dari sektor pertanian ke non pertanian hal ini dikarenakan adanya peningkatan pada sektor perdagangan dan jasa. Aspek sosial kependudukan secara mikro hanya pada variabel rasio guru terhadap murid yang kecenderungannya negatif, artinya pada tahun 2002 sebanyak satu orang guru mengajar 14 siswa, sedangkan pada tahun 2012 sebanyak satu orang guru mengajar 18 siswa. Dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan bentuk investasi yang sangat penting bagi pengembangan suatu wilayah. Aspek infrastruktur secara mikro kecenderungan perkembangannya positif. Artinya sarana yang tersedia setelah ada pemekaran itu semakin banyak jumlahnya dalam hal ini sarana pendidikan dan kesehatan. Dapat disimpulkan bahwa pemekaran memberikan pengaruh terhadap ketersediaan infrastruktur.

Secara keseluruhan, Kabupaten Jayapura mengalami perkembangan setelah adanya pemekaran wilayah. Dapat disimpulkan juga bahwa peningkatan infrastruktur dalam hal ini sarana pendidikan dan sarana kesehatan memberikan pengaruh terhadap peningkatan kondisi ekonomi dan sosial-kependudukan. Sehingga untuk membangun suatu wilayah pemekaran yang baru, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan meliputi peningkatan sumber daya manusia terutama faktor pendidikan dan kesehatan.

Daftar Pustaka

- Fisher, A. C. (1981). *Natural resource and environmental economics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Jhingan, M. L. (1992). *Ekonomi pembangunan dan ekonomi perencanaan* (D. Guritno, Trans.). Jakarta: Penerbit Rajawali.
- Kerlinger, F. N. (1986). *Foundations of behavioral research*. New York: University Holt, Rinehart, and Winston Inc.
- Khairullah & Cahyadin, M. (2006). *Evaluasi pemekaran wilayah di Indonesia: Studi kasus Kabupaten Lahat*. Yogyakarta: Pascasarjana UGM.
- Kodoatie, R. (2005). *Pengantar manajemen infrastruktur*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rasyid, R. (2007). *Otonomi daerah dalam negara kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Riduwan. (2004). *Metode dan teknik menyusun tesis*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Riyadi, D. S. (2002). *Pengembangan wilayah dan otonomi daerah*. Jakarta: Pusat Pengkajian Kebijakan Teknologi Pengembangan Wilayah.
- Sakti, R. K. (2010). Studi hubungan budaya dengan aglomerasi ekonomi (north-south corridor) di Jawa Timur. *Wacana*, 13(13), 431-438.
- Ventauli. (2009). *Mengelola dinamika politik dan sumber daya daerah*. Yogyakarta: Program S2 Politik Lokal dan Otonomi Daerah UGM.
- World Bank. (2001). *Decentralization: rethinking government*. Retrieved from World Bank E-Library website: http://elibrary.worldbank.org/doi/abs/10.1596/0195211243_Chapter5.

